

BAB VI. PENUTUP

Diakhir bagian tulisan ini, berdasarkan pembahasan diatas penulis memiliki kesimpulan dan saran sebagai berikut :

6.1. Kesimpulan

Adanya program Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Potensial di Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Program tersebut ditujukan untuk pemberdayaan bagi Lansia Potensial. Program UEP bagi Lansia Potensial tidak semata – mata bertujuan untuk pemberdayaan Lansia secara ekonomi tetapi lebih ke arah investasi sosial.

Dari hasil analisis yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, beberapa hal yang bisa disimpulkan bahwa implementasi program usaha ekonomi produktif bagi Lansia potensial di Kota Yogyakarta jika dilihat dari sisi kredibilitas pusat dirasa kurang, karena daerah melihat bahwa pusat hanya sekedar memaksakan kepada daerah untuk melaksanakan program tanpa ada dukungan pendanaan. Hal ini berimbas pada kecilnya dana yang digulirkan untuk program, karena murni mengandalkan APBD Kota. Efek domino yang ditimbulkan dengan kecilnya dana yang digulirkan maka berakibat pada sedikitnya jumlah sasaran penerima manfaat program sehingga efek dari program

hanya menyentuh pada sebagian kecil dari total Lansia potensial yang ada di Kota Yogyakarta, hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa sumber daya finansial yang kurang dan juga kecilnya sasaran penerima manfaat dibandingkan populasi maka manfaat dari program kurang dirasakan secara maksimal oleh Lansia Potensial di Kota Yogyakarta.

Jika kita bicara manfaat di kelompok penerima manfaat, walaupun program ini tidak secara signifikan berpengaruh secara ekonomi bagi kehidupan Lansia potensial, tetapi memiliki dampak yang positif dalam hal kehidupan sosial mereka. Efek tidak langsung dari adanya bantuan menyebabkan mereka lebih aktif dalam berinteraksi sosial, berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan, aktif dalam kegiatan kelompok arisan dan simpan pinjam. Hal ini selaras dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No. 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia pasal 12 huruf c yang menyatakan bahwa penguatan usaha ekonomis produktif melalui pendekatan kelembagaan sebagai investasi sosial.

Dari sisi kendala yang ditemukan pada implementasi program ini cukup variatif, mulai dari sisi peraturan atau payung hukum di daerah yang dirasa belum lengkap, kapasitas dari PSM yang mendampingi dirasa kurang, baik dari sisi pengetahuan dan juga alokasi waktunya, kondisi dari Lansia yang secara fisik sudah menurun kemampuannya,

dan ada juga beberapa kasus penyimpangan pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh penerima manfaat yang seharusnya digunakan untuk keperluan usaha tetapi justru digunakan untuk belanja kebutuhan konsumsi.

Jika dilihat dari persebaran wilayah kelompok Lansia yang menerima program ini, pada tahun 2017 hanya ada di 7 kelompok di 7 kelurahan yang ada di 6 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, sementara target yang ada pada tahun tersebut adalah 8 kelompok. Hal ini disebabkan karena hanya kelompok yang aktif dan yang mengajukan proposal yang mendapat bantuan. Program ini adalah program yang penerima manfaatnya adalah individu yang disalurkan melalui kelompok – kelompok Lansia, untuk menambah modal usaha masing – masing anggotanya. Sehingga tidak bisa dipetakan jenis usaha per kelompoknya, begitu juga tingkat keberhasilan secara ekonomi tidak bisa dipetakan per kelompok. Keberhasilan per kelompok bisa dilihat dari dampak tidak langsungnya yaitu dari sisi investasi sosialnya, yaitu dengan adanya program ini bisa menjadi stimulan untuk munculnya kegiatan – kegiatan lain dan menambah tingkat partisipasi Lansia dalam kelompoknya masing – masing.

Kemudian dari sisi faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program, yang pertama dari faktor internal maka dapat

disimpulkan bahwa konten kebijakan yang ditingkat nasional sudah cukup lengkap tidak didukung dengan kebijakan di daerah, karena di daerah belum ada peraturan tingkat daerah yang mengatur mengenai kesejahteraan lanjut usia. Selain itu pesan dari kebijakan yang sudah adapun tidak sampai ke tingkat implementor baik di tingkat dinas maupun implementor di lapangan, sehingga hal ini merupakan faktor negatif yang tentu saja menyebabkan tidak maksimalnya implementasi program di lapangan. Tetapi jika dilihat dari komunikasi dan koordinasi yang ada, implementasi program ini termasuk yang *simple structure*, karena hanya Dinas Sosial yang terlibat langsung berhubungan dengan kelompok – kelompok Lansia penerima manfaat dan pendamping lapangan yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Hal ini sebenarnya menjadi suatu hal yang positif karena tidak berbelitnya struktur organisasi yang ada, sehingga implementor di lapangan bisa langsung melakukan koordinasi dan komunikasi dengan implementor di tingkat dinas. Sementara jika dilihat dari sisi sumber daya manusia, dengan tidak adanya pelatihan teknis yang khusus bermaterikan mengenai pendampingan usaha ekonomi produktif bagi pendamping lapangan menyebabkan pengetahuan dan keterampilan para PSM sangatlah kurang, selain itu jumlah PSM yang terbatas dan banyaknya tugas sosial lain yang mereka emban selain pendampingan program ini

menyebabkan tidak maksimalnya mereka melakukan pendampingan bagi para penerima manfaat. Kedua hal diatas menjadi faktor negatif dalam implementasi program.

Selanjutnya, jika dilihat dari faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program ini, beberapa hal yang bisa disimpulkan antara lain kondisi lingkungan. Dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, keamanan dan situasi politik yang kondusif di wilayah program merupakan faktor yang positif. Faktor budaya juga merupakan faktor yang positif karena berdasarkan temuan yang ada, masyarakat sekitar yang tetap mendukung jika ada Lansia yang masih bekerja, atau tidak ada norma yang melarang Lansia melakukan usaha atau bekerja. Tetapi jika dilihat dari kondisi dukungan birokrat setempat, terutama pihak kelurahan yang tidak tahu banyak mengenai program, tidak adanya evaluasi dan pengawasan program dari pihak Dinas, hal tersebut bisa dikatakan sebagai faktor yang negatif dari pelaksanaan program ini. Kemudian dari sisi penerima manfaat, pertama perihal kemudahan dalam mengadopsi atau melaksanakan program, pihak penerima manfaat merasa tidak ada masalah dengan hal itu karena dengan program ini mereka hanya tinggal melanjutkan usaha atau kegiatan mereka. Hal ini merupakan faktor yang positif bagi implementasi program ini. Kemudian yang kedua, mengenai perubahan yang terjadi

pada penerima manfaat dari program ini, jika dilihat dari sisi ekonomi tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang investasi sosial, maka program ini memiliki efek perubahan positif pada kebiasaan penerima manfaat. Tentu saja hal ini merupakan faktor positif pengaruhnya bagi implementasi program.

Untuk lebih mudah memahami pengaruh variabel ataupun sub variabel baik di faktor internal maupun faktor eksternal dan juga tingkat pengaruhnya bagi implementasi program UEP bagi Lansia potensial di Kota Yogyakarta bisa dilihat di tabel berikut :

Tabel 6.1
Faktor – faktor Yang Berpengaruh Positif Terhadap Implementasi Program UEP Bagi Lansia Potensial di Kota Yogyakarta

Internal			Eksternal		
Variabel	Sub Variabel	Tingkat Pengaruh	Variabel	Sub Variabel	Tingkat Pengaruh
Kapasitas Organisasi	Struktur Birokrasi	Berpengaruh	Kondisi Lingkungan	Kondisi Sosial, ekonomi, Politik	Kurang berpengaruh
	Komunikasi dan koordinasi	Berpengaruh		Kondisi Budaya	Kurang berpengaruh
			Penerima manfaat	Kemudahan mengadopsi atau melaksanakan program	Berpengaruh
				Perubahan yang terjadi akibat manfaat program	Sangat berpengaruh

Tabel 6.2
Faktor – faktor Yang Berpengaruh Negatif Terhadap Implementasi
Program UEP Bagi Lansia Potensial di Kota Yogyakarta

Internal			Eksternal		
Variabel	Sub Variabel	Tingkat Pengaruh	Variabel	Sub Variabel	Tingkat Pengaruh
Konten kebijakan	Kelengkapan dan kejelasan pesan regulasi	Sangat berpengaruh	Kondisi Lingkungan	Dukungan pemerintah setempat.	Berpengaruh
Kapasitas Organisasi	Sumberdaya manusia	Berpengaruh			

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh diatas, beberapa saran yang penulis sampaikan antara lain melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota untuk segera memiliki peraturan mengenai kesejahteraan lanjut usia di tingkat daerah, sehingga nantinya para pelaksana program terkait kesejahteraan lanjut usia memiliki pedoman yang jelas dan adanya perhatian yang lebih bagi kesejahteraan Lansia.

Kemudian bagi pelaksana program, dalam hal ini Dinas Sosial, penulis menyarankan untuk menyusun dan melaksanakan sebuah SOP mengenai monitoring dan evaluasi program yang jelas, sehingga bisa diketahui tingkat keberhasilan dari program tersebut. Tidak hanya sekedar program bagi – bagi dana bansos, tanpa diketahui bagaimana pelaksanaan dilapangan dan sejauh mana manfaat dari program

tersebut. Selain itu mendorong pemangku kepentingan untuk meningkatkan peran serta komunitas yang di inisiasi pemerintah kelurahan dalam hal partisipasi Lansia dalam kegiatan – kegiatan kelanjutusiaan, sehingga akan lebih banyak ruang bagi lansia untuk berinteraksi sosial, mengekspresikan diri, melakukan usaha preventif dan kuratif kesehatannya yang diharapkan imbasnya adalah terbentuk Lansia yang sehat, mandiri dan bermartabat

Terkait dengan permasalahan sumber daya manusia, mendorong adanya peningkatan kapasitas SDM bagi PSM, bisa dengan cara menugaskan seorang pendamping profesional untuk Program UEP bagi Lansia Potensial ini, atau dengan memberikan pelatihan – pelatihan teknis kepada para PSM mengenai pendampingan usaha ekonomi produktif.